

### **Abstrak**

Penelitian dilakukan dengan melihat fenomena terjadi permasalahan dari proses pelimpahan pengelolaan pendidikan SMA sederajat. Permasalahan bermula dari diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal yang menjadi masalah mengenai pelimpahan pengelolaan SMA dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Provinsi. Terjadi Penolakan dari beberapa kepala daerah, salah satunya walikota Surabaya. Pertanyaan Penelitian dari penelitian ini yaitu bagaimana respon dari pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan SMA dan sederajat dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi, dan apa implikasi pelimpahan tersebut bagi Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi.

Penelitian dilakukan di kota Surabaya. Narasumber penelitian yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Komisi D DPRD Kota Surabaya, SMA Negeri 16 Surabaya, dan SMA Trimurti. Penelitian ini menggunakan teori Desentralisasi, yang mana akan membedah bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan cara wawancara mendalam, dan analisa dokumen. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian didapatkan terjadi pembagian urusan pelaksanaan pendidikan antar tingkatan pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan SMA berubah dari pemerintah tingkat II yaitu Kota/Kabupaten kepada pemerintah tingkat I yaitu Provinsi melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi urusan pemerintahan di daerah. Pengelolaan SMA dipegang oleh Provinsi bertujuan akan membawa kemajuan di bidang pendidikan. Hal ini akan menjadi fokus pemerintah provinsi dalam pemerataan pendidikan di daerahnya. Dalam prosesnya terjadi implikasi bagi pemerintah dan masyarakat diantaranya implikasi politik, administrasi, dan sosial.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Desentralisasi, Implikasi Kebijakan

### **Abstract**

Research is done by seeing the phenomenon of problems from the process of the delegation of high school education management. The issue began from the enactment of law No. 23 of 2014 on local governments. It is the problem of the delegation of high school management from the city government to the provincial government. There was rejection from several regional heads, one of the mayor of Surabaya. The research question of this research how the response of the pelimpahan high school education management authority and equal from City Government to the provincial government, and what are the implications of that for the Government pelimpahan Surabaya The Provincial Government.

Research conducted in the city of Surabaya. The research resource is the education office of East Java Province, Surabaya Office of Education, Commission D of the Jakarta City DPRD, SMA Negeri 16 Surabaya, and SMA Trimurti. This research uses decentralized theory, which will dissect how the relationship between the central and local governments. Data collection techniques used in depth interviews, and document analysis. The data analysis technique used is qualitative.

The research results obtained by implementation of the Education Affairs Division occurs between different levels of Government. The Organization of the education HIGH SCHOOL changed from level II Government City/County Government level I namely the province through Act No. 23 of the year 2014 that aims for the effectiveness and efficiency of Government Affairs in the region. Management of the HIGH SCHOOL held by the province aims will bring progress in the field of education. This will be the focus of the provincial government in equitable education in regions. In the process happen the implications for Government and society including political implications, administration, and social.

Keywords : Education, Decentralization, Implication of Policy